

Judul : Batu Bara Dukung Ketahanan Energi Nasional: Forum Energi
Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 3

FORUM **ENERGI** (LIVESTREAM)

BATU BARA DUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Menjadi primadona energi, cadangan batu bara di Indonesia masih melimpah, bahkan mencapai 21 milyar Ton dengan pemanfaatan yang baru 25 persen saja.

Batu bara disebut sebagai sumber daya alam yang mendukung ketahanan energi nasional Indonesia. Hal ini menjadi wajar karena jumlah cadangan batu bara di Indonesia yang masih melimpah, bahkan mencapai 21 milyar ton dengan pemanfaatan yang baru 25 persen saja.

Namun demikian, kondisi jaman yang dinamis dan terus berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi industri batu bara dalam mendukung ketahanan energi nasional. Untuk membahas lika-liku industri pertambangan batu bara di Indonesia, Tempo menggelar Forum Energi dengan tema "Peran Batu Bara dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional" pada Selasa, 28 Juli 2020, secara *live streaming* di Youtube dan Facebook Tempo.

Adapun narasumber yang



dihadirkan, yakni Azis Armand, Vice President Director & CEO Indika Energy; Sujatmiko, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM; Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia; serta Maman Abdurrahman, Anggota Komisi VII DPR RI; dan dipandu oleh Tomi Aryanto, Direktur Tempo.co.

Terkait masa depan energi Indonesia, Sujatmiko menyampaikan bahwa industri batu bara tetap berpotensi menjadi andalan karena manfaatnya sebagai sumber energi kehidupan, sumber investasi dan sumber pengembangan ekonomi nasional.

Hendra Sinadia pun mengamini hal itu. Menurutnya, saat ini

adalah momentum dimana seluruh pihak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara untuk bersatu dalam menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19. "Jadi tidak ada lagi dikotomi antara BUMN atau perusahaan swasta nasional, kita sama-sama mengembangkan sektor pertambangan ini," ujarnya.

Perihal industri batu bara di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan saling berkaitan dalam berbagai aspek. Mulai soal teknis pertambangan, bisnis, hingga regulasi yang melibatkan kebijakan pemerintah dan masukan masyarakat jadi topik yang menarik untuk ditelaah, apalagi mengingat

kontribusi batu bara secara ekonomi.

"Jadi, hampir 80 persen PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Mineral didapat dari batu bara, secara ekonomi, batu bara ini menjadi ikonnya mineral," ujar Sujatmiko.

Sementara itu, Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pentingnya sumber daya batu bara ini membutuhkan regulasi yang jelas dan melindungi semua pihak, seperti Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba yang disahkan Mei lalu.

"Yang perlu digaris bawahi dari keberadaan UU Minerba adalah, perlu adanya kepastian hukum kepada semua teman-teman kita yang bergerak di industri pertambangan ini, khususnya batu bara," kata Maman.

Sejalan dengan Maman, Azis Armand sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan menyampaikan bahwa seluruh pihak yang bergerak di industri batubara membutuhkan kepastian hukum yang melindungi usaha dari segi investasi dan tanggung jawab perusahaan.

Azis berharap agar pemerintah dapat memperhatikan tiga azas dalam penyusunan tarif pajak maupun bukan pajak.

1. Azas peningkatan penerimaan negara

Sesuai dengan amanah UU, peningkatan penerimaan negara

merupakan sesuatu yang perlu terjadi. Karenanya, diperlukan rincian lebih lanjut terkait variabel penghitungannya.

2. Azas keekonomisan

Penetapan tarif pajak atau bukan pajak hendaknya tidak membuat kegiatan pertambangan menjadi tidak ekonomis. Hal ini berkaitan erat dengan pemanfaatan batu bara dalam mendukung ketahanan energi nasional.

3. Azas kesetaraan

Izin pertambangan hendaknya menerapkan kesetaraan dalam penetapan tarif pajak maupun bukan pajak terhadap setiap perusahaan pertambangan batu bara.

Sementara itu, Kementerian ESDM saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Sujatmiko mengatakan terdapat tiga RPP yang dibahas:

- RPP tentang pengelolaan pertambangan mineral
 - RPP terkait dengan wilayah pertambangan
 - RPP tentang pembinaan dan pengawasan
- Pembahasan ketiga RPP ini ditargetkan selesai pada Desember 2020.

• TIM INFO TEMPO